

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

KELAYAKAN LABUNGKARI SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BUTON TENGAH

Yohanes Boni¹, H. Saemu Alwi², Syamsul Anan³

^{1 2 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Article Info

ABSTRAK

Article history:

Received 04-05, 2022

Revised 04-28, 2022

Accepted 05-21, 2022

Keywords:

Aksesibilitas; Pusat

Pelayanan; Pusat

Pertumbuhan,

Labungkari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan sumberdaya wilayah dan letak geografis La Bungkari sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Buton Tengah. Analisis data menggunakan: analisis grafitasi, analisis skalogram dan analisis aksesibilitas. Hasil analisis grafitasi menunjukkan Labungkari sebagai Pusat pemerintahan Kabupaten Buton Tengah dengan daerah belakang (hinterland) 7 (tujuh) Kecamatan mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik dan mempunyai fungsi yang spesifik sehingga keduanya tergantung secara internal. Fungsi Labungkari sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan Kabupaten Buton Tengah adalah : (1) pusat pemukiman; (2) pusat pelayanan; (3) pusat industri; dan (4) pusat perdagangan bahan mentah. Sedangkan fungsi daerah belakang Kecamatan dan Desa sebagai : (1) penyedia bahan mentah dan sumber daya dasar; (2) daerah pemasaran barang-barang industri; dan (3) pusat kegiatan pertanian dan industry kerajinan rumah tangga. Aktivitas kegiatan setiap Kecamatan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan cenderung mengalir ke wilayah Labungkari, sebaliknya berbagai aktivitas kegiatan pelayanan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan sector pertanian, sector industry dan sector jasa akan mengalir keseluruh wilayah Kecamatan dan Desa secara adil dan merata. Dari hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa Kecamatan Gu peringkat 1 (satu) dan Kecamatan Lakudo peringkat 2 (dua) yang memiliki jumlah dan jenis fasilitas pelayanan,. Letak lokasi Labungkari di Kecamatan Gu dan Kecamatan Lakudo. sehingga kriteria Labungkari sebagai pusat pertumbuhan wilayah memiliki jumlah dan jenis fasilitas terbanyak untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk di Kabupaten Buton Tengah. Hasil analisis aksesibilitas, Labungkari terletak ditengah Kabupaten Buton Tengah, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kota Kendari dapat dijangkau dengan biaya transportasi yang murah dan waktu tempuh yang cepat. Sentralitas Labungkari sebagai pusat pertumbuhan merupakan pusat aktivitas kegiatan sosial, ekonomi dan budaya serta pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.idWebsite : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

This is an open access article under the CC BY-SA license

Corresponding Author:**Yohanes Boni**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Email :

DOI: <http://dx.doi.org/10.32833/majem.v11i1.233>

I. PENDAHULUAN

Regulasi hukum pada tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini telah mengakibatkan perubahan paradigma pembangunan baik secara fungsional maupun struktural yang mengintegrasikan kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat secara bersamaan. Pemerintah pusat menfokuskan aktifitasnya sebagai fasilitator dan dinamisator bukan sebagai eksekutor atau pelaksana pembangunan. Dalam arti bahwa terjadinya suatu kegiatan pembangunan hanya dan untuk atas nama daerah yang bersangkutan (Demand Side Approach). Pergeseran paradigma pembangunan tersebut membutuhkan penyesuaian dan analisis detail setiap fenomena ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang cenderung semakin kompleks. Variabel berpengaruh dari setiap fenomena tersebut dipengaruhi oleh pranata sosial budaya, perubahan cara pandang, aneka kepentingan masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi yang berdampak kepada semakin ketatnya persaingan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel peubah yang harus disikapi dengan model perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir berbagai aspek kepentingan masyarakat Buton Tengah dalam jangka panjang.

Dusseldorp (2009) mengatakan, salah satu aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah aspek ruang yaitu suatu lokasi yang tepat ketersediaan fasilitas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Dusseldorp Kualitas fungsi pelayanan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis fasilitas yang ditawarkan, sedangkan ukuran fungsi pelayanan setiap pusat pemukiman tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani. Pada wilayah yang jaringan transportasinya sudah lebih berkembang, fungsi pelayanan ditentukan oleh jumlah penduduk. Sedangkan wilayah yang jaringan transportasinya masih kurang, fungsi pelayanan ditentukan oleh luas wilayah yang dilayaninya.

Labungkari sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan Kabupaten Buton Tengah telah memenuhi syarat seperti yang dikatakan Dusseldorp (2009) sebagai pusat pelayanan, tesis ini ditunjukkan oleh kemajuan berbagai sektor ekonomi selama Kabupaten Buton Tengah dimekarkan. Kemajuan tersebut terlihat dari semakin meningkatnya kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan sosial dan budaya masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Kondisi ini perlu dikawal dengan regulasi hukum, agar aspirasi kepentingan masyarakat lokal dalam proses perencanaan

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.idWebsite : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

pembangunan daerah dapat terwujud, dan pengembangan potensi sumberdaya daerah dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien. .

Hubungan fungsional Labungkari sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan Kabupaten Buton Tengah dengan daerah belakangnya (hinterland) bersifat komplementer dan tidak kompetitif. Fungsi Labungkari sebagai pusat pemerintahan menjadi penyangga kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat akan menjadi penentu tumbuh dan berkembangnya wilayah Kecamatan. Tingginya intensitas polarisasi berbagai kegiatan ekonomi dan social budaya yang disebabkan semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, memicu kebutuhan perencanaan wilayah yang memiliki probabilitas yang tinggi dari aspek pelayanan maupun kontinuitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah. Dusseldorp (2009) mengemukakan ada tiga fungsi yang diemban pusat pelayanan yaitu: (a) Fungsi pelayanan (b) Fungsi pemukiman (c) Fungsi ekonomi. Ini berarti Labungkari sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Buton Tengah dan sebagai pusat pelayanan harus memiliki berbagai fasilitas yang mampu memberi pelayanan kepada kepentingan penduduk semua wilayah Kecamatan dalam mengakses sumber daya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah.

Kerangka pemikiran tersebut menunjukan, Labungkari telah merekonstruksi letak geografis dan potensi sumberdaya lokal yang mampu memberikan pelayanan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara adil, merata dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah. Wilayah Labungkari memiliki aksesibilitas yang sangat baik merupakan peluang dalam mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi setiap Kecamatan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan secara nyata di Kabupaten Buton Tengah.

II. KAJIAN TEORITIS

Konsep

Konsep yang digunakan adalah konsep pertumbuhan dan kesejahteraan. Konsep pertumbuhan menyatakan bahwa penambahan investasi akan menaikkan pendapatan atau output melalui proses pengganda jangka pendek atau jangka panjang. Konsep kesejahteraan menyatakan bahwa kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dianggap tepat apabila masyarakat sasaran memperoleh manfaat yang lebih besar (better off) dibanding kerugian yang terjadi (worse off)

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perencanaan yakni perencanaan pusat pertumbuhan dengan asumsi bahwa pembangunan wilayah identik dengan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan.

III. METODE PENELITIAN

Kelayakan Labungkari menjadi pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan menggunakan metode analisis skalogram, sosiogram, dan

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

grafitasi dengan tahapan proses sebagai berikut :

- Tahap 1 : Identifikasi permasalahan dan potensi daerah yang dilakukan melalui studi dokumentasi dan survey potensi sumberdaya wilayah Kabupaten Buton Tengah.
- Tahap 2 : Melaksanakan Focus Group Discasion (FGD) setiap Kecamatan untuk mendapatkan masukan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buton Tengah.
- Tahap 3 : Data sekunder dan data primer diolah dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu:
- Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan lapangan.
 - Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan data/ informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan tabel, dan grafik.
 - Penarikan kesimpulan yaitu mencari arti, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin dan alur sebab akibat sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Situasi Wilayah

1. Geografis

Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah kepulauan yang terletak di Jazirah Sulawesi Tenggara meliputi Bagian Utara pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitarnya yaitu kepulauan Talaga Raya. Secara geografis Kabupaten Buton Tengah terletak di bagian selatan khatulistiwa memanjang dari utara ke selatan $5,15^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur $122,33^{\circ}$ Bujur Timur. Luas daratan kabupaten Buton Tengah $837,08 \text{ Km}^2$. Batas-batas wilayah, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton, Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Buton Tengah terdiri dari 7 Kecamatan, 68 Desa dan 9 kelurahan.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 sebanyak 114.772 jiwa dengan rincian laki-laki 128.049 jiwa dan perempuan sebanyak 135.127 jiwa. Kepadatan penduduk 219 jiwa/km, dan pertumbuhan penduduk 2,91 persen per tahun. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tengah Menurut Kecamatan, Tahun 2015-2018

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|----|----------------------|------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Talaga Raya | 9.074 | 9.590 | 9.708 | 9.824 | 3,67 |
| 2. | Masawangka | 22.125 | 23.051 | 23.286 | 23.566 | 2,77 |
| 3. | Mawasangka Tengah | 9.174 | 9.541 | 9.636 | 9.752 | 3,35 |

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

| | | | | | | |
|--|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 4. | Mawasangka Timur | 4.856 | 5.062 | 5.115 | 5.174 | 2,39 |
| 5. | Lakudo | 20.283 | 21.184 | 21.408 | 21.664 | 3,77 |
| 6. | Gu | 15.877 | 16.493 | 16.654 | 16.853 | 3,12 |
| 7. | Sangia Wambulu | 5.021 | 5.238 | 5.292 | 5.357 | 1,67 |
| Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tengah | | 86.410 | 90.159 | 91.099 | 92.190 | 2,91 |

Sumber: BPS Buton Tengah, 2019

Pada tabel 1 diatas menunjukkan, Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2019 terdapat tiga Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Lakudo, dan Kecamatan Gu. Sedangkan Kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah Kecamatan Talaga Raya 3,67 persen, Kecamatan Mawasangka Tengah 3,35, Kecamatan Lakudo 3,77, dan Kecamatan Gu 3,12 persen. Secara geografis wilayah Labungkara berada pada wilayah Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu, sehingga dari spek jumlah dan pertumbuhan penduduk Labungkari telah menunjukkan sebagai pusat pertumbuhan penduduk Kabupaten Buton Tengah.

3. Sarana Sosial

Ketersediaan sarana pendidikan dan sarana Kesehatan pada suatu wilayah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan dan Kesehatan bagi penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, semakin tinggi jumlah penduduk suatu wilayah semakin banyak pula sarana Pendidikan dan sarana kesehatann yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Ketersediaan sarana penddikan dan sarana Kesehatan menurut Keccamatan di Kabupaten Buton Tengah dapat dilihat pada table 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Sarana Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Buton Tengah Menurut Kecamatan, Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jumlah Sarana Pendidikan | | | Jumlah Sarana Kesehatan | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----|-----|-------------------------|-----------|-------------|
| | | SD | SMP | SMA | Poliklinik | Puskesmas | Rumah Sakit |
| 1. | Talaga Raya | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Masawangka | 25 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3. | Mawasangka Tengah | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Mawasangka Timur | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Lakudo | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6. | Gu | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Sangia Wambulu | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah Kabupaten Buton Tengah | | 95 | 29 | 18 | 2 | 13 | 1 |

Sumber: BPS Buton Tengah, 2019

Pada tabel 2 diatas menunjukkan, jumlah sarana pendidikan SMA yag terbanyak

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

diKabupaten Buton Tengah adalah Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, dan Kecamatan Mawasangka. Sedangkan ketersediaan sarana Kesehatan yang paling lengkap Kecamatan Gu yaitu terdapat 2 buah poliklinik, 2 buah puskesmas, dan 1 buah Rumah sakit. Dengan demikian Kecamatan Gu telah menjadi pusat pelayanan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah, sehingga Labungkari menjadi sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Buton Tengah.

4. Sarana Ekonomi

Ketersediaan sarana ekonomi suatu wilayah merupakan sarana pendukung pengembangan kegiatan ekonomi sekaligus menjadi indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah, semakin banyak unit usaha dan kecendrungan semakin berkembangnya unit usaha tersebut, menjadi indikator pengembangan kegiatan ekonomi diwilayah tersebut semakin maju. Kondisi ini dapat diamati dari semakin banyaknya unit usaha dan semakin meningkatnya omzet usaha pada setiap unit usaha.

Tabel 3. Jumlah UMKM dan Pasar Kab. Buton Tengah Menurut Kecamatan, tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah Unit Usaha dan Pasar | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Jumlah Pasar |
| 1. | Talaga Raya | 118 | 2 | -- | 4 |
| 2. | Masawangka | 124 | 9 | -- | 4 |
| 3. | Mawasangka Tengah | 128 | 8 | -- | 3 |
| 4. | Mawasangka Timur | 32 | 2 | -- | 2 |
| 5. | Lakudo | 586 | 12 | 20 | 6 |
| 6. | Gu | 565 | 10 | 5 | 3 |
| 7. | Sangia Wambulu | 70 | 2 | -- | 3 |
| Jumlah Kabupaten Buton Tengah | | 2.345 | 45 | 25 | 25 |

Sumber: BPS Buton Tengah, 2019

Pada tabel 3 diatas menunjukkan, Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu memiliki unit usaha ekonomi yang terbanyak di Kabupaten Buton Tengah, hal tersebut terlihat dari 2.345 usaha Mikro di Kabupaten Buton Tengah sebanyak 1.151 unit usaha ada di Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu. dari 45 unit usaha Kecil sebanyak 22 unit usaha di Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu, dan sebanyak 25 unit usahha Menengah di Kabupaten Buton Tengah semua berada di Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu. Dengan dmikian dari aspek ketersediaan sarana ekonomi Labungkari layak menjadi pusat pegembangan usaha yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian Kabupaten Buton Teengah.

Analisis Pusat Pelayanan

1. Analisis pusat pertumbuhan (*Growth centre Analysis*)

Glasson dan Ricardson (1978) menjelaskan bahwa tiga tipologi ruang abstrak yaitu: (a) ruang yang ditentukan oleh rencana, (b) Ruang yang merupakan medan kekuatan ekonomi, dan (c) ruang merupakan suatu agregat homogen. Labungkari adalah pusat

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi merupakan ruang yang ditentukan rencana. Terbangunnya infrastruktur wilayah, sarana ekonomi, dan sarana social di Labungkari yang didesain oleh pemerintah merupakan daya tarik yang membentuk pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi medan kekuatan ekonomi dari kekuatan *sentrifugal* memancar pada seluruh wilayah Kecamatan yang merupakan kekuatan *sentripetal* dari wilayah pedesaan. Pusat pertumbuhan Labungkari memiliki wilayah pengaruh (*hinterland*) Kecamatan yang membentuk 7 wilayah pusat pertumbuhan dengan daerah pengaruhnya wilayah pedesaan.

Berdasarkan teori pusat pertumbuhan bahwa kegiatan ekonomi dan social budaya di Kabupaten Buton Tengah akan cenderung beraglomerasi pada 7 (tujuh) wilayah Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, dan arus polarisasi akan bergravitasi kearah pusat pertumbuhan utama Labungkari yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan penambahan jenis serta jumlah fasilitas pelayanan, dimana kepadatannya akan semakin berkurang dengan semakin besarnya jarak dari pusat pertumbuhan Labungkari.

2. Perencanaan Pusat Pelayanan

Labungkari sebagai Pusat ibukota Kabupaten Buton Tengah dengan daerah belakang (*hinterland*) 7 (tujuh) Kecamatan mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik dan mempunyai fungsi yang spesifik sehingga keduanya tergantung secara internal. Fungsi Labungkari sebagai ibukota Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai : (1) pusat pemukiman; (2) pusat pelayanan; (3) pusat industri; dan (4) pusat perdagangan bahan mentah. Sedangkan fungsi daerah belakang Kecamatan dan Desa berfungsi sebagai : (1) penyedia bahan mentah dan sumber daya dasar; (2) daerah pemasaran barang-barang industri; dan (3) pusat kegiatan pertanian dan industry kerajinan rumah tangga.

Hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa jumlah dan jenis fasilitas pelayanan setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah adalah : Kecamatan Gu peringkat 1 (satu) dan Kecamatan Lakudo peringkat 2 (dua) yang memimiliki jumlah dan jenis fasilitas pelayanan, sedangkan Kecamatan Mawasangka peringkat 3 (tiga), kemudian Kecamatan Mawasangka Tengah peringkat 4 (empat), Kecamatan Mawasangka Timur peringkat 5 (lima), Kecamatan Sangia Wambulu peringkat 6 (enam), dan Kecamatan Talaga Raya peringkat 7 (tujuh). Letak wilayah Labungkari di Kecamatan Gu dan Kecamatan Lakudo, sehingga kriteria Labungkari sebagai pusat pertumbuhan wilayah memiliki jumlah dan jenis fasilitas terbanyak untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk di Kabupaten Buton Tengah dapat dipenuhi. Dengan demikian hasil analisis skalogram Labungkari layak menjadi ibukota Kabupaten Buton Tengah.

Analisis Antar Pusat Pertumbuhan

1. Analisa Gravitasi :

Berdasarkan peta topografi skala 1: 25.000 diketahui bahwa jarak terdekat antar kota Kecamatan tersebut yang dapat dilalui dengan kendaraan roda 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jarak Tempuh Labungkari dengan 7 pusat Kecamatan di Buton Tengah

| Pusat Kecamatan | Lombe | Lakudo | Tolandona | Lanto | Lamena | Mawasangka | Talaga |
|-----------------|-------|--------|-----------|-------|--------|------------|--------|
| Labungkari | 4 km | 5 km | 15 km | 32 | 25 km | 50 km | 75 km |

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.idWebsite : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

km

Sumber : BPS Kab. Butong Tengah, 20199

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan, jarak tempuh Labungkari – Lombe = 4 km, jarak tempuh Labungkari – Lakudo = 5 km, jarak tempuh Labungkari – Tolandona = 15 km, jarak tempuh Labungkari – Lanto = 32 km, jarak tempuh Labungkari – Lamena = 25 km, jarak tempuh Labungkari – Mawasangka = 50 km dan jarak tempuh Labungkari – Talaga = 75 km. Dengan menggunakan analisis interaksi antar wilayah, maka interaksi penduduk antara Labungkari dengan 7 (tujuh) pusat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut: interaksi Labungkari – Lombe = 59,6 kali per jam, interaksi Labungkari –Lakudo = 67,9 kali per jam, interaksi Labungkari – Tolandona = 25,4 kali per jam, interaksi Labungkari – Lanto = 12,9 kali per jam, interaksi Labungkari – Lamena = 9,7 kali per jam, interaksi Labungkari – Mawasangka = 22,8 kali per jam, dan interaksi Labungkari – Talaga = 0,6 kali per jam.

Dari hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa interaksi penduduk dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, social dan budaya yang paling besar terjadi antara Labungkari dengan Lombe ibukota Kecamatan Gu 59,6 kali per jam, dan Labungkari dengan Lakudo ibukota Kecamatan Lakudo 67,9 kali per jam. Sedangkan interaksi penduduk antara Labungkari dengan Kecamatan Mawasangka Tengah dan Kecamatan Mawasangka Timur rata-rata 11,3 kali per jam dan Kecamatan Mawasangka 22,8 kali per jam, kondisi ini disebabkan Labungkari sebagai ibukota Kabupaten Buton Tengah berlokasi dipersimpangan jalur jalan poros menuju Kota Bau-Bau sebagai pusat perdagangan, industry dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan penduduk, serta jalur jalan poros menuju Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

Teori Sumbu Pembangunan mengatakan bahwa pembangunan mengambil bentuk satu jalur tata ruang linear sepanjang rute transportasi utama. Meningkatnya volume lalu lintas sepanjang rute transpor ke Labungkari dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, akan menyebabkan timbulnya suatu proses komulatif perkembangan pembangunan baik jumlah maupun kualitasnya. Akibatnya adalah, penduduk, industri dan perdagangan cenderung tertarik pada Labungkari sebagai sumbu pembangunan. Sektor pertanian yang dekat dengan Labungkari sebagai sumbu pembangunan akan mendapatkan keuntungan oleh adanya kemudahan ke pasar dan ke pusat-pusat pelayanan yang lebih besar. Dengan demikian, hasil analisisiis grafitasi menunjukkan bahwa Labungkari layak menjadi pusat pemerintahann, pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten utton Tengah.

2. Analisa Sentralitas (Centrality Analysis)

Teori tempat sentral diperkenalkan oleh Christaler (1933) kemudian dikembangkan oleh Berry dan Garrison (1970) menggambarkan struktur tata ruang merupakan suatu kerangka bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka penyebaran fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Sentralitas wilayah Labungkari adalah tempat atau lokasi yang merupakan pusat aktivitas kegiatan sosial ekonomi dan social budaya serta pusat penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah. Aktivitas kegiatan social ekonomi dan social budaya setiap kota-kota Kecamatan dan pedesaan sebagai simpul-simpul pusat pertumbuhan cenderung mengalir ke wilayah Labungkari sebagai ibukota Kabupaten Kabupaten Buton Tengah, sebalik berbagai

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

aktivitas kegiatan pelayanan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan sector pertanian, sector industry dan sector jasa akan mengalir keseluruh wilayah Kecamatan dan Desa secara adil dan merata. Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis wilayah Labungkari yang sangat strategis dalam mengakses berbagai kebutuhan penduduk, terutama ketersediaan berbagai sarana ekonomi dan sarana sosial yang ada di Kecamatan Gu maupun di Kecamatan Lakudo.

Dukungan ketersediaan sarana ekonomi dan sarana sosial di Kecamatan Gu dan Kecamatan Lakudo, serta letak geografis wilayah yang sangat memudahkan aksesibilitas pada semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, maka pengembangan infrastruktur pemerintahan yang dipusatkan di Labungkari akan menjadi daya Tarik yang kuat tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat kekuatan ekonomi industry-industri serta pasar, dan sarana pelayanan social seperti Pendidikan dan Kesehatan. Dengan demikian Labungkari menjaddi pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat kegiatan industry dan pasar yang menjangkau dan menampung semua produksi hasil pertaniann dan industri dari wilayah Kecamatan dan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah. Dengan teknik analisis ini dapat menentukan Labungkari sebagai ibukota Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya akan digunakan oleh perencana pembangunan untuk merancang wilayah Labungkari untuk pembangunan sarana pelayanan sosial dan ekonomi, perkantoran, sarana olah raga, pemukiman masyarakat, jalan dalam kota Labungkari serta infrastruktur wilayah lainnya .

Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas wilayah yaitu waktu tempuh, jarak tempuh dan biaya transportasi barang dan penumpang “Labungkari” memiliki angka konig terendah dari semua lokasi Kecamatan Kabupaten Buton Tengah. Teori tempat sentral menggambarkan struktur tata ruang merupakan suatu kerangka bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka penyebaran fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Buton hendak mengembangkan lokasi Labungkari dengan mengarahkan semua investasi pemerintah dan investasi swasta ke Labungkari, maka sarana social dan ekonomi, dan infrastruktur wilayah akan berkembang dengan cepat ke Labungkari.

3. Analisis Aksesibilitas Wilayah

Letak geografi Labungkari sebagai ibukota Kabupaten Buton Tengah memiliki aksesibilitas yang sangat baik dari aspek transportasi darat maupun dari aspek transpotasi laut. Keputusan mengenai lokasi yang diambil oleh DPRD Kabupaten Buton dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sangat menentukan struktur tatarung wilayah kabupaten buton Tengah. secara deskripsi dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Aksesibilitas Labungkari sebagai Pusat Pertumbuhan Kab. Buton Tengah

| Daerah Asal | Daerah Tujuan | Jarak Tempuh (Km) | Waktu Tempuh | Moda Angkutan | Biaya Angkut (Rp) PP |
|-------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Labungkari | Kota Kendari | Laut | 4 jam | Kapal cepat & Mobil | 250.000 |
| Labungkari | Baubau (Ibu Kota Baubau) | Laut | 30 menit | Mobil & Fery | 30.000 |
| Labungkari | Raha (Ibu Kota Kab. Muna) | 60 | 1 jam | Mobil&Motor | 100.000 |

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

| | | | | | |
|------------|---------------------------|-----|----------|--------------|--------|
| Labungkari | Kabupaten Muna Barat | 50 | 1 jam | Mobil | 75.000 |
| Labungkari | Pelabuhan Wamengkoli | 10 | 15 menit | Mobil&Motor | 15.000 |
| Labungkari | Kec. Sangia Wambulu | 15 | 10 menit | Mobil&Motor | 15.000 |
| Labungkari | Kec. Mawasangka Timur | 25 | 30 menit | Mobil&Motor | 25.000 |
| Labungkari | Kec. Mawasangka Tengah | 30 | 35 menit | Mobil&Motor | 30.000 |
| Labungkari | Kecamatan Gu (Lombe) | 0-7 | 10 menit | Mobil&Motor | 5.000 |
| Labungkari | Kec. Lakudo (Tolandona) | 0-4 | 10 menit | Mobil&Motor | 5.000 |
| Labungkari | Kecamatan Talaga | 60 | 2 jam | Mobil & Fery | 75.000 |
| Labungkari | Kecamatan Mawasangka | 50 | 1 jam | Mobil&Motor | 40.000 |
| Labungkari | Pelabuhan Kota Bau-Bau | 15 | 30 menit | Fery | 30.000 |

Sumber : Survei lokasi & BPS Kab. Buton Tengah

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan, Labungkari memiliki aksesibilitas yang sangat layak dilihat dari aspek jarak tempuh, waktu tempuh, moda angkutan dan biaya angkut pada setiap tujuan perjalanan Kecamatan baik dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah. Kondisi tersebut disebabkan wilayah Labungkari bertempat ditengah-tengah Kabupaten Buton Tengah. Demikian pula aksesibilitas wilayah Labungkari dengan beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara seperti Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kota Kendari menunjukkan sangat layak dari aspek jarak tempuh, waktu tempuh, biaya angkut maupun dari aspek ketersediaan moda angkut pada setiap daerah tujuan perjalanan.

V. KESIMPULAN

1. Hasil analisis Skalogram perencanaan pusat pelayanan menunjukan Kecamatan Lakudo peringkat II dan Kecamatan Gu peringkat I dari aspek ketersediaan jenis fasilitas pelayanan dan jumlah fasilitas pelayanan, diketahui bahwa lokasi Labungkari diantara Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu.
2. Hasil analisis model gravitasi dan analisis sentralitas menunjukan bahwa intraksi antar wilayah labungkari – Lombe dan Labungkari – Lakudo memiliki nilai tertinggi. Meningkatnya volume lalu lintas ke Labungkari menyebabkan timbulnya suatu proses komulatif pembangunan, sehingga penduduk, industri dan perdagangan cenderung tertarik pada lokasi Labungkari.
3. Hasil analisis aksesibilitas wilayah menunjukan bahwa Labungkari terletak pada lokasi yang sangat strategis yaitu dipertengahan Kabupaten Buton Tengah. Aksesibilitas Labungkari dengan Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kota Kendari dapat dijangkau dengan biaya transportasi yang murah dan waktu tempuh yang cepat serta ketersediaan moda transportasi yang muda.

Dari hasil analisis Skalogram perencanaan pusat pelayanan, model gravitasi dan analisis sentralitas, dan aksesibilitas wilayah menunjukkan bahwa LABUNGKARI sangat LAYAK sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pusat pelayanan masyarakat Kabupaten Buton Tengah.

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., *et al* (2014). Pembangunan Ekonomi. dan Pemberdayaan Rakyat, BPF, Yogyakarta.
- Aghion, P & Bolton, 2012. Theory of trickle down growth and development, Review of economics studies
- Barlow R. (2012) Land Resources Economics. Prencite hall inc. New Jersei.
- Bintarto R & Surastopo H. (2011) Metode Analisa Geografi, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Budhiharsono S. (2016) Perencanaan Pembangunan Wilayah. Teori, Model dan Penerapannya, Penerbit UNB Bogor
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2020) Indikator Fundamental Ekonomi Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), buku II: Agenda pembangunan bidang. Jakarta: Bappenas.
- BPS. (2017). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2017. Press release, 5 August. http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150805111616.pdf.
- Departemen Kimpraswil, (2011). Integrasi Prasarana Transportasi Perdesaan Dalam Sistranas, Makalah Seminar Nasional Peranan Transportasi Perdesaan Dalam Mendukung Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Edgar M. Hoover (2014). An Introduction to Regional Economics, Alfred A. Knops New York
- Glasson John (1974). An Introduction to Regional Planning, Hutchinson of London.
- Harry W. Richardson, (1960). Regional Economics Location Theory, Urban Structure and Regional Change, Praeger Publisher Washington
- Irsard Walter, (1960). Method of Regional Analisis, An Introduction to Regional Science, The MIT Press London
- Kuncoro, M. (2013). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta
- Magribi, La Ode Muhamad, (2013), Kebutuhan Akses di Perdesaan: Tinjauan Mengenai Upaya Pengentasan Kemiskinan, Makalah untuk Workshop Enhancing The Capacity Of Civil Society To Support Pro-Poor Transport Policies and Programmes in Developing Countries, Makassar.
- Micevska, M. and D. B. Rahut. (2018). Rural Nonfarm Employment and Incomes in the Himalayas. Economic Development and Cultural Change. 57 (1). pp. 163–93.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (2011), Masterplan percepatan dan pengembangan perekonomian Indonesia 2011-2025. Mei, 2011
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (2017) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton 2016 - 2036,
- Universitas Gadjah Mada, (2012), Dinamika Pedesaan dan Kawasan, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.